

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)****Status Verifikasi Administratif Lengkap****BIDANG : EKSEKUTIF****LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN****UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **PRIMA KUSUMA SUMANTRI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBINAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**
3. NHK : **120206**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.186.761.270**

1. Bangunan Seluas 30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 350.400.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 643.970.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 976 m2/85 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, Rp. 92.950.270
4. Tanah Seluas 3.069 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 876.665.000
5. Tanah Seluas 2.021 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 167.722.000
6. Tanah Seluas 647 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 55.054.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 147.000.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000
3. MOBIL, NISSAN X-TRAIL Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
65.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 108.080.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. 81.175.418****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 94.868.929****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----**



Sub Total	Rp.	2.617.885.617
III. HUTANG	Rp.	224.250.710
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.393.634.907

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.